

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islamic State of Iraq and Syria atau lebih dikenal di Indonesia dengan sebutan sederhananya, ISIS, merupakan kelompok golongan muslim Sunni radikal yang mengalami kebangkitan pada tahun 2013 dan menghendaki perwujudan berdirinya kekhalfahan atau negara Islam di wilayah Irak dan Suriah melalui konflik bersenjata. Meskipun asal-usul ISIS sesungguhnya dapat ditelusuri sejauh tahun 1999, kebangkitan ISIS sebagai kekhalfahan dan ancaman global yang serius baru dimulai pada tahun 2014. Seiring dengan pemberontakan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Nouri al-Maliki di Irak dan gelombang revolusi Arab Spring di Suriah dan negara-negara di Kawasan Timur Tengah, ISIS memanfaatkan krisis dan ketidakpuasan publik yang terjadi untuk menghimpun kekuatan dan menggalang dukungan. Pada tahun 2014, ISIS memiliki sebanyak 280.000 tentara milisi dan merupakan salah satu kekuatan paling signifikan di Kawasan Timur Tengah¹.

Pada tanggal 29 Juni 2014, Abu Bakar al-Baghdadi secara resmi mendeklarasikan berdirinya kekhalfahan ISIS dengan Kota Raqqa sebagai ibu kota dan dirinya sendiri sebagai Kalif atau pemimpin atas seluruh umat Islam di dunia². Tahun 2014 terbukti sebagai masa puncak kejayaan dan kekuatan ISIS.

1 *Introduction: Down the Rabbit Hole and Into the History of ISIS*, Princeton University, 2015, hlm. 2.

2 Tony Blair Institute for Global Change, "Diving Deep into the Origins of ISIS", diakses dari

Pada tahun ini, ISIS telah menguasai sebesar 40 persen wilayah Irak dan sepertiga wilayah Suriah. Serangkaian kemenangan kilat oleh ISIS di Kawasan Timur Tengah mulai menyita sorotan perhatian dari komunitas internasional. Banyak negara terkejut atas perkembangan ISIS yang begitu drastis. Reaksi internasional segera menyusul. Pada tanggal 24 September 2014, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2178 yang diantaranya mengklasifikasikan ISIS sebagai organisasi teroris dan mendorong negara-negara anggota untuk bertindak menghadapi ISIS. Sebagaimana yang telah dihimbau, negara-negara di dunia segera bertindak sedemikian rupa. Arab Saudi, Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara anggota Uni Eropa dan Persemakmuran merupakan pihak-pihak pertama yang merespon.

Selain tingkat negara, banyak tokoh dan pemimpin agama Islam di dunia turut mengecam tindakan ISIS dan tidak mengakui klaim kepemimpinan Abu Bakar al-Baghdadi atas umat Islam sedunia. Terlebih lagi, mereka bahkan berani menyatakan bahwa ajaran ISIS bukan merupakan bagian dari Islam. Mufti Agung Arab Saudi, Syeikh Abdul Aziz Al-Asheikh menyebut ISIS sebagai musuh nomor satu bagi seluruh umat Islam³. Kecaman serupa juga datang dari Mufti Agung Mesir, Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam yang menyebut ISIS sebagai ancaman bagi ajaran Islam dan kaum muslim sebab organisasi tersebut akan

<https://institute.global/sites/default/files/articles/Diving-Deep-into-the-Origins-of-ISIS.pdf>, pada tanggal 27 Januari 2020.

3 Reuters, "ISIL Islam's Enemy No. 1, Saudi Grand Mufti Says", diakses dari <https://gulfnnews.com/world/mena/isil-islams-enemy-no1-saudi-grand-mufti-says-1.1374063> pada tanggal 14 Maret 2020.

menghancurkan dan merusak citra agama Islam⁴. Tokoh-tokoh yang bersangkutan ini berupaya membedakan dan memisahkan diri mereka dan kelompok yang mereka wakili dari ISIS.

Meskipun memperoleh pertentangan dari berbagai pihak, ambisi ISIS tidak berhenti di Irak dan Suriah. Kedua negara ini tidak lain hanya merupakan pijakan bagi langkah ISIS yang selanjutnya yaitu menyebar dan mendirikan kekhalifahan atau negara Islam di seluruh dunia, termasuk di negara-negara barat. ISIS membuat tujuan ini jelas ketika Abu Bakar al-Baghdadi mengungkapkan bahwa ISIS hendak menaklukkan Spanyol dan Portugal, dan bahkan Roma, pusat umat Nasrani satu pusat peradaban kuno Eropa. ISIS mengklaim akan meruntuhkan dinding-dinding yang selama ini telah memecah dan memisahkan umat Islam⁵. Oleh sebab itu, Abu Bakar al-Baghdadi mengajak seluruh umat Islam untuk bermigrasi dari negara-negara asal masing-masing ke kekhalifahan yang baru didirikan dan bersatu di bawah kepemimpinan Beliau dan bendera ISIS untuk mewujudkan kekhalifahan dunia. Sejauh ini, ISIS telah bertanggung jawab atas tindakan genosida, pembersihan etnis, pelanggaran hak asasi manusia, dan bahkan aksi terorisme di berbagai negara di dunia.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang secara mayoritas terdiri dari golongan muslim Sunni sebagaimana yang telah

4 Republika, "Menyoal Nama ISIS Alias Negara Islam", diakses dari <https://republika.co.id/berita/ncncki4/menyoal-nama-isis-alias-negara-islam>, pada tanggal 14 Maret 2020.

5 Jessica Elgot, "ISIS Head Abu Bakar al-Baghdadi Warns "We Will Conquer Rome"", diakses dari https://www.huffingtonpost.co.uk/2014/07/02/rome-conquer-islam_n_5550646.html?guccounter=1, pada tanggal 14 Maret 2020.

disampaikan, kerjasama kaum muslim di Indonesia berperan vital dalam rencana organisasi tersebut dan secara tidak langsung keberlangsungan kekhalifahan⁶. Jejak awal penyebaran ISIS ke Indonesia dapat ditelusuri bahkan sebelum Kekhalifahan ISIS berdiri di Irak dan Suriah.

Mendengar serangkaian kemenangan ISIS secara kilat dalam merebut kekuasaan di Irak dan Suriah, disertai jatuhnya diktator dan pemerintah otoriter di negara-negara Kawasan Timur Tengah dalam peristiwa Arab Spring, menanamkan kepercayaan dalam diri banyak kelompok fundamentalis Islam di Indonesia bahwa ramalan atas kembalinya *Imam Mahdi* atau Juru Selamat dan berdirinya kekhalifahan Islam di dunia akan segera dipenuhi hingga menginspirasi mereka untuk bergabung, beraliansi, dan turut berjuang dalam mewujudkan kekhalifahan Islam, termasuk melakukan aksi terorisme. Seorang tokoh ulama konservatif dan garis keras bernama Aman Abdurrahman dan kelompok jihadis Jamaah Ansharut Daulah (JAD) bersumpah setia kepada ISIS pada bulan Januari 2014⁷. Sehari setelah deklarasi berdirinya Kekhalifahan ISIS oleh Khalifah Abu Bakar al-Baghdadi, Aman Abdurrahman menegaskan kembali sumpah ini pada tanggal 30 Juni 2014. Tercatat bahwa kelak terdapat setidaknya 18 organisasi atau kelompok jihadis Indonesia selain JAD yang berbaiat dan bergabung dengan ISIS yaitu, *Jamaah Ansharud Tauhid (JAT)*, *Mujahidin Indonesia Barat (MIB)*, *Mujahidin Indonesia Timur (MIT)*, *Ring Banten*, *Jamaah Tawhid wal Jihad*,

6 Pew Research Center, "The Future of the Global Muslim Population", diakses dari <https://www.pewforum.org/2011/01/27/future-of-the-global-muslim-population-sunni-and-shia/>, pada tanggal 15 Juni 2020.

7 *The Evolution of ISIS in Indonesia*, IPAC Report, 2014, hlm. 11.

*Forum Aktivis Syariah Islam (Faksi), Pendukung dan Pembela Daulah, Gerakan Reformasi Islam, Asybal Tawhid Indonesia, Kongres Umat Islam Bekasi, Umat Islam Nusantara, Ikhwan Muwahid Indunisy Fie, Jazirah al-Muluk, Ansharul Kilafah Jawa Timur, Halawi Makmun Group, Gerakan Tawhid Lamongan, Khilafatul Muslimin, dan Laskar Jundullah*⁸. Terlebih lagi, gerakan ISIS dalam mendirikan kekhalifahan terindikasi memperoleh dukungan dari dua organisasi masyarakat besar dengan jumlah pengikut yang cukup signifikan di Indonesia yaitu *Front Pembela Islam (FPI)* dan *Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)* atas dasar kesamaan visi yaitu mendirikan kekhalifahan Islam.

Tokoh lain yang turut berkontribusi membantu penyebaran pengaruh di Indonesia adalah Abu Muhammad al-Indunisy. Menjelang berdirinya kekhalifahan ISIS di Irak dan Suriah, Abu Muhammad al-Indunisy merupakan salah satu warga Indonesia yang berangkat menuju Suriah dan bergabung ISIS. Sesampainya di Suriah, al-Indunisy membentuk kesatuan ISIS bernama *Katibah Nusantara Lid Daulah Islamiyyah* yang beranggotakan warga negara Indonesia, Malaysia, Filipina, dan bahkan Singapura dengan misi mendirikan negara Islam kepulauan di Kawasan Asia Tenggara bernama *Daulah Islamiyah Nusantara* dan merupakan bagian dari kekhalifahan global ISIS⁹.

Dalam rangka menyebarluaskan pemikiran dan pengaruhnya ke berbagai penjuru Indonesia, ISIS melancarkan kampanye propaganda yang agresif melalui situs-situs dan jejaring media sosial milik akun kelompok-kelompok jihadis di

8 Muhammad Muhyiddin, Reza Aditya, & Linda Trianita, "ISIS Indonesia Deklarasikan Jamaah Baru", dalam *Tempo*, 2015.

9 IPAC Report, *Op.cit.*, hlm. 1.

Indonesia yang telah didirikan sebelumnya sebagai sarana utama, yang diantaranya meliputi situs majalah online www.almuahjirun.com dan situs online www.al-mustaqbal.net, situs blog www.millahibrahimwordpress.com¹⁰. Melalui situs-situs ini, ISIS mempromosikan hukum Syariat Islam kepada warga Indonesia sebagai bagian dari kampanye propaganda *Sharia4Indonesia*. Sebagai contohnya, pada tanggal 22 Juli 2014 ISIS mengunggah video di situs jejaring berbagi video Youtube yang berjudul "*Join the Rank*" atau "Bergabung dalam Barisan"¹¹.

Dalam video yang berdurasi selama 8 menit, salah satu tokoh ISIS asal Indonesia, Abu Muhammad al-Indunisy mengajak warga Indonesia untuk bergabung dengan ISIS dan melakukan jihad di Irak dan Suriah, serta mendukung perjuangan ISIS dalam mewujudkan kekhalifahan dunia. Warga Indonesia secara tidak langsung menjadi terpapar oleh propaganda yang diunggah ISIS, baik secara disengaja maupun tidak sengaja. Target demografi propaganda ISIS di Indonesia tidak hanya terbatas pada warga negara Indonesia yang merupakan anggota golongan Islam konservatif atau garis keras, tapi turut mencakup warga Indonesia beraliran Islam moderat yang selama ini merasa dirugikan dan terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia.

Sebagaimana yang telah diterapkan secara sukses di Irak dan Suriah, ISIS kembali mengambil langkah-langkah yang serupa di Indonesia. ISIS berupaya memanfaatkan ketidakpuasan publik akibat kekurangan dan keterbatasan

10 *Ibid*, hlm. 3.

11 Tempo, "Bachrumsyah Dikabarkan Tewas di Suriah, Ini Jejaknya", diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/856257/bachrumsyah-dikabarkan-tewas-di-suriah-ini-jejaknya>, pada tanggal 16 Maret 2020.

kemampuan Indonesia sebagai negara berkembang untuk memprovokasi warga Indonesia agar menentang pemerintah. ISIS berusaha menanamkan keyakinan dalam diri kaum muslim di Indonesia bahwa pemerintah demokratis yang berkuasa dengan ideologi yang selama ini berlaku telah gagal, disfungsional, penuh korupsi dan ketidakadilan, dan bertanggung jawab atas berbagai masalah dan penderitaan yang menimpa rakyat Indonesia, termasuk kemiskinan, kesenjangan, kesejahteraan rendah, dan rendahnya kesadaran atas hak asasi manusia, serta sikap kebijakan yang cenderung deskriminatif dengan adanya pembatasan hak politik bagi golongan-golongan tertentu. Pada saat yang bersamaan, ISIS kembali menempatkan diri sebagai pihak kekuatan oposisi terhadap pemerintah Indonesia yang berkuasa dan mencitrakan diri sebagai kekuatan progresif dan revolusioner Islam yang menentang status-quo dan hendak membawa perubahan nyata yang selama ini tidak mampu diberikan oleh pemerintah Indonesia.

Di luar dugaan presepsi umum, kegiatan perekrutan massal ISIS tidak selalu dilakukan secara tertutup, melainkan juga dilakukan secara terbuka di ruang-ruang publik tertentu, seperti masjid, pondok pesantren, dan kampus perguruan tinggi. Salah satu sarana yang dimaksud adalah sebuah seminar bertema Menyingkap Khalifah Abu Bakar al-Baghdadi yang diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2014 di Kendal, Jawa Tengah¹². Meskipun berkedok sebagai ceramah menentang ISIS, ceramah tersebut ternyata adalah tempat kampanye

12 Fredy B. L. Tobing & Erwin Indradjaja, "Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) and Its Impact in Indonesia", dalam *Global: Jurnal Politik Internasional*, Vol. 21, No. 1, 2019, hlm. 112.

propaganda dan perekrutan massal bagi ISIS. Contoh-contoh lain adalah upacara baiat dan perekrutan massal ISIS yang diselenggarakan di Masjid Istiqomah di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dan Masjid Al-Jamiah UIN Syarif Hidayatullah di Kota Tangerang, Banten¹³. ISIS bahkan turut berpartisipasi dalam program-program sosial dan pembangunan di sejumlah daerah terpencil di Indonesia, termasuk di Jawa Timur, Bandung, Sumatera Utara, Tanjung Balai, Bekasi, Tangerang, dan Bima. Pengembangan di daerah-daerah ini diharapkan mampu mengembangkan zona-zona Syariah yang telah dirintis oleh kelompok-kelompok jihadis sebelumnya dan dapat dimanfaatkan sebagai basis dukungan dan perlawanan, serta tempat persembunyian bila dibutuhkan. Sebagaimana yang diimplikasikan oleh istilahnya, zona syariah adalah zona khusus yang menerapkan aturan-aturan ketentuan hukum Syariat Islam, sehingga bertentangan dengan sistem hukum UUD 1945 dan ideologi Pancasila¹⁴. Di zona-zona ini, pemerintah Indonesia hanya berkuasa atas nama saja dan kekuasaan sesungguhnya berada di tangan para tokoh pemimpin simpatisan dan anggota lokal ISIS.

Kehadiran dan berkembangnya pengaruh ISIS di Indonesia yang sedemikian rupa segera memicu gelombang serangan teror sebagai bagian dari upaya organisasi teroris tersebut untuk mendirikan kekhilafahan di Indonesia melalui perlawanan bersenjata berupa jihad. Setidaknya ISIS telah melancarkan 4 serangan teror besar di Indonesia. Serangan teror besar pertama ISIS di Indonesia terjadi pada tanggal 14 Januari 2016 berupa pengeboman pos jaga polisi dan aksi

13 IPAC Report, *Op.cit.*, hlm. 16.

14 *Ibid*, hlm. 5.

baku tembak di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat¹⁵. Serangan ini melukai 24 warga sipil dan menewaskan 8 orang, 4 diantaranya merupakan anggota teroris. Dilaporkan bahwa serangan teror ini dilaksanakan melalui cabang JAD, tapi diperintahkan dan dikoordinasikan oleh para petinggi ISIS di Suriah melalui jejaring media sosial Telegram¹⁶. Pada tanggal 5 Juli 2016 ISIS kembali bergerak dengan melakukan serangan teror bom bunuh diri di depan gerbang Mapolres Surakarta¹⁷. Aksi serangan ini menewaskan pembom sendiri dan melukai seorang petugas aparat kepolisian. Pada tahap ini muncul pola serangan teror yang membuktikan dengan jelas bahwa ISIS menyasar institusi-institusi perwakilan pemerintah Indonesia, terutama pihak kepolisian. Bukti ini semakin diperkuat ketika ISIS kembali melancarkan aksi serangan teror berupa pengeboman di Kampung Melayu, Jakarta pada tanggal 25 Mei 2017 dengan sasaran anggota aparat kepolisian¹⁸. Serangan ini menewaskan tiga polisi dan dua orang pelaku bom bunuh diri, serta melukai puluhan warga sipil. Ancaman teror ISIS telah berkembang begitu serius di Indonesia hingga tidak lagi dapat diabaikan.

Namun pada tahun 2017, ISIS tidak lagi berada di puncak kejayaan dan mulai mengalami kemunduran di Kawasan Timur Tengah. Pada tanggal 20 Juli 2017, Kota Mosul yang merupakan ibu kota ISIS di Irak berhasil dibebaskan oleh operasi gabungan pasukan koalisi internasional. Kekalahan ISIS di Irak kemudian

15 IPAC Report, *Op.cit.*, hlm. 20.

16 Muhammad Ikhsan Mahar, "Terorisme dan Pemblokiran Telegram", dalam Kompas, 2017.

17 DW Indonesia, "Daftar Serangan Jamaah Ansharud Daulah (JAD) di Indonesia", diakses dari <https://www.dw.com/id/daftar-serangan-teror-jad-di-indonesia/g-43803485>, pada tanggal 27 Januari 2020.

18 *Loc.cit.*

disusul dengan kekalahan serupa di Suriah yang ditandai dengan jatuhnya Kota Raqqa, ibu kota ISIS di Suriah pada tanggal 20 Oktober 2017¹⁹. Serangkaian kekalahan ISIS di Kawasan Timur Tengah yang sedemikian rupa memaksa organisasi teroris ini untuk beradaptasi dengan realitas keadaan yang berbeda. Kekhalifahan ISIS telah runtuh dan organisasi terorisme tersebut tidak lagi mampu melanjutkan perlawanan bersenjata yang terorganisir secara global.

Keadaan yang sedemikian rupa mereduksi keberadaan ISIS yang sebelumnya merupakan ancaman asing lintas batas negara menjadi sekedar ancaman lokal atau domestik. Dalam konteks ini, ISIS tidak lagi melakukan terorisme berbasis jihad tanzim atau jihad melalui organisasi, tapi justru beralih ke jihad fardiyah atau jihad individu. Transformasi ISIS ini dikonfirmasi oleh kutipan artikel bertajuk Strategi Amniyah yang disebarakan oleh ISIS melalui media sosial dan berisi sebagai berikut:

“Tidaklah kita menceburkan diri dalam jihad ini, dalam khatibah irhaby ini, untuk memerangi musuh-musuh Allah, untuk meneror, merusak, membuat takut, membuat cemas musuh-musuh Allah kecuali agar hukum Allah tegak. Kami nasihatkan untuk antum sel baru, kami nasihatkan kepada antum tetaplah antum bersama jaringan antum, janganlah pernah mencoba menjalin komunikasi dengan jaringan lain, khususnya jaringan lama.” (Solahudin, 2019).

Akibat perkembangan situasi yang terjadi, sel-sel ISIS di Indonesia yang sebelumnya merupakan organisasi terstruktur dan mampu berkoordinasi, serta menerima instruksi dan arahan dari para petinggi ISIS di Irak dan Suriah sebagai

19 Jeff Seldin, “Kilas Balik 2017: Pupus, Mimpi ISIS dirikan Kekhalifahan di Irak dan Suriah, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/kilas-balik-2017-mimpi-isis-dirikan-kekhalfahan-pupus-/4172927.html>, pada tanggal 28 Januari 2020.

bagian dari operasi ISIS secara global, terpaksa beroperasi secara otonom dan berlaku sebagai ancaman domestik, sehingga kebijakan keamanan nasional Indonesia dalam menghadapi terorisme ISIS pasca 2017 turut mengalami perubahan pula. Berdasarkan penjelasan yang sedemikian rupa, maka terorisme ISIS dan kebijakan keamanan nasional Indonesia dalam menghadapi terorisme organisasi tersebut pasca 2017 tidak masuk dalam penelitian ini.

Dalam rangka memberikan gambaran sekilas dan meningkatkan kualitas relevansi penelitian hingga dapat dipahami secara lebih mendalam dan komprehensif, dilakukan perbandingan atas kebijakan keamanan nasional yang telah dilaksanakan oleh negara-negara tertentu yang memiliki kesamaan karakteristik hampir serupa dengan Indonesia sebagai rujukan. Layaknya Indonesia, Turki bukan merupakan negara Islam, melainkan negara berkembang republik demokratis dengan sistem pemerintahan presidensial dan memiliki komposisi demografi penduduk yang sebagian besar terdiri atas pengikut agama Islam Sunni.

Sejauh ini, Turki terbukti memiliki tendensi menggunakan kekuatan keras sebagai kebijakan keamanan nasional dalam menghadapi terorisme ISIS berupa pengerahan militer dalam skala massal untuk melancarkan aksi serangan udara dan penyerbuan darat lintas perbatasan. Turki bahkan melakukan kerjasama internasional untuk melawan ISIS dengan bergabung dalam intervensi koalisi militer di Irak dan Suriah sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Tercatat dalam kurun waktu ini, Turki telah melancarkan lebih dari 59 aksi serangan udara

dan penyerbuan lintas perbatasan terhadap pasukan ISIS yang berada dalam zona operasi²⁰. Meskipun Turki memang mengambil kebijakan keamanan nasional yang bersifat koersif dalam menghadapi terorisme ISIS, tapi kebijakan tersebut cenderung bersifat reaktif pula, sehingga hanya berlaku sebagai bentuk retaliasi atau pembalasan secara terukur.

Negara lain yang dapat digunakan sebagai perbandingan untuk memperkirakan dan mengetahui lebih lanjut atas bagaimana kebijakan keamanan nasional Indonesia dalam menghadapi terorisme ISIS adalah Republik Mesir. Layaknya Indonesia dan Turki, Mesir merupakan negara berkembang republik demokratik yang memiliki sistem pemerintahan presidensial dan sebagian besar penduduknya terdiri atas golongan Islam.

Kebijakan keamanan nasional Mesir dalam menghadapi terorisme ISIS tidak jauh berbeda dengan Turki dengan kecenderungan menggunakan kekuatan keras secara reaktif dan turut menjalin kerjasama internasional. Sebagai contohnya, pada tanggal 16 Februari tahun 2015 Mesir melancarkan aksi serangan udara lintas perbatasan terhadap ISIS di Libya sebagai bentuk komitmen negara tersebut dalam koalisi militer dengan negara Libya dalam melawan ISIS dan sekaligus sebagai bentuk pembalasan atas serangan teror ISIS di Libya yang menewaskan lebih dari dua puluh warga negara Mesir.²¹ Namun pada saat yang bersamaan, Mesir turut melakukan perubahan struktural dengan melenyapkan faktor-faktor yang mengakibatkan terorisme tersebut. Salah satu contoh studi

20 *Turkey vs. ISIS and PKK: A Matter of Distinction*, Bipartisan Policy Center, 2016, hlm. 5.

21 *Five Years of Egypt's War on Terror*, The Tahrir Institute for Middle East Policy, 2018, hlm. 51.

kasus bentuk perwujudan nyata dari kebijakan ini adalah menanamkan pemikiran Islam yang lebih moderat melalui revolusi agama pada tahun 2017²².

Perbandingan kebijakan keamanan nasional Turki dan Mesir sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya memberikan rujukan gambaran sekilas atas tindakan yang diambil oleh negara-negara dengan karakteristik hampir serupa dengan Indonesia. Namun, belum mampu mewakili atau mencerminkan kebijakan keamanan nasional Indonesia dalam konteks yang sama yaitu menghadapi terorisme ISIS.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya kebijakan keamanan nasional Indonesia sebagai negara berkembang demokratis dengan penduduk Islam terbesar di dunia terhadap terorisme kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sebagai ancaman asing pada periode tahun 2014-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Tujuan penelitian ini secara umum adalah memberikan pengetahuan bagi para mahasiswa dan mahasiswi melalui penyusunan karya tulis ilmiah berupa skripsi berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh pihak peneliti. Penyusunan karya tulis ilmiah ini juga merupakan kewajiban akademik yang

²² Giuseppe Dentice, "The Geopolitics of Violent Extremism: The Case of Sinai", dalam 36 Papers IEMed, EuroMeSCo, No. 36, 2018, hlm. 44.

hendak dipenuhi oleh pihak peneliti sebagai salah satu persyaratan kelulusan dan meraih gelar strata 1 atau S1 dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Tujuan penelitian ini secara khusus adalah memberikan pemaparan atas kebijakan keamanan nasional Indonesia sebagai negara berkembang demokratis dengan penduduk Islam terbesar di dunia terhadap terorisme kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sebagai ancaman asing pada periode tahun 2014-2017. Tujuan lain penelitian ini adalah mengetahui kemampuan Indonesia dalam menghadapi terorisme ISIS sebagai ancaman asing. Dengan demikian, diharapkan bahwa keberadaan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan keamanan nasional Indonesia dalam menghadapi terorisme ISIS secara menyeluruh dan komprehensif.

1.4 Kerangka Pemikiran

Dalam rangka mengkaji kebijakan keamanan nasional Indonesia terhadap terorisme kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) pada periode tahun 2014-2017, maka pihak peneliti menentukan landasan teori sebagai berikut:

1.4.1 Landasan Teori

Landasan teori yang dapat digunakan dalam mengkaji kebijakan keamanan nasional Indonesia dalam menghadapi terorisme ISIS adalah Kontraterorisme dan

Keamanan Nasional.

1.4.1.1 Keamanan Nasional

Menurut pernyataan yang dikemukakan oleh Harold Brown, keamanan nasional dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh negara untuk menjaga integritas fisik dan teritori, mempertahankan hubungan ekonomi, menjaga alam, institusi, dan pemerintahan dari gangguan luar dan mengendalikan perbatasan negara tersebut²³. Kapasitas keamanan nasional terdiri atas unsur-unsur militer, ekonomi, politik, teknologi, dan pendidikan. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya dan kondisi terkini, secara umum keamanan nasional merujuk pada keamanan dan pertahanan yang dimiliki oleh negara untuk melindungi teritori, institusi, ekonomi, kedaulatan, dan keselamatan warga negara dari segala bentuk ancaman dan gangguan yang melanda, baik dari dalam maupun dari luar. Dalam konteks ini, keselamatan unsur-unsur negara paling diutamakan daripada yang lain. Meskipun terkesan domestik, perlu diketahui bahwa keamanan nasional sebenarnya turut mencakup ruang lingkup internasional sebab terkadang negara membutuhkan kerjasama dengan negara lain agar mampu melenyapkan ancaman dan gangguan yang keamanan nasional dari luar, sehingga negara dapat menciptakan keadaan yang mampu menunjang dan mendukung keamanan nasional negara tersebut. Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan oleh negara dalam menjaga dan mempertahankan keamanan nasional. Apabila diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya, maka secara umum terbagi menjadi

²³ Harold Brown, "Thoughts on Technology and National Security", dalam *John Hopkins APL Technical Digest*, Vol. 6, No. 4, hlm. 361.

dua yaitu koersif dan non-koersif. Sedangkan instrumen atau alat negara yang dapat dimanfaatkan dalam menjaga keamanan nasional adalah militer, aparat kepolisian, badan intelejen, institusi-institusi pemerintahan, kapasitas ekonomi, hubungan diplomatik, dan lain sebagainya²⁴.

1.4.1.2 Kontraterorisme

Kontraterorisme atau dapat pula dikenal dengan sebutan antiterorisme merujuk pada segala upaya anti-teror yang diimplementasikan oleh aktor pemerintah negara menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam rangka melawan ancaman terorisme. Sejauh ini, kontraterorisme masih sulit diinterpretasikan sebab setiap negara, institusi, dan ilmuwan memiliki definisi yang berbeda mengenai kontraterorisme. Apabila merujuk pada pernyataan yang dikemukakan oleh Ronald Crelinsten, kontraterorisme sangat berhubungan erat dan dipengaruhi oleh karakteristik gejala terorisme yang terjadi dalam ruang lingkup keamanan²⁵. Dalam konteks ini, Ronald Crelinsten mengklasifikasikan kontraterorisme menjadi 5 jenis sebagai bentuk kebijakan keamanan nasional dalam menghadapi terorisme, yaitu kontraterorisme koersif, kontraterorisme proaktif, kontraterorisme persuasif, kontraterorisme defensif, dan kontraterorisme jangka panjang.

1.4.1.3 Kontraterorisme Jangka Panjang

Sebagaimana yang telah disampaikan sekilas sebelumnya, Kontraterorisme

24 Kim R. Holmes, "What is National Security", dalam *2015 Index of U.S. Military Strength*, 2015, hlm. 18.

25 Ronald Crelinsten, "Perspectives on Terrorism", dalam *A Journal of the Terrorism Research Initiative*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 2.

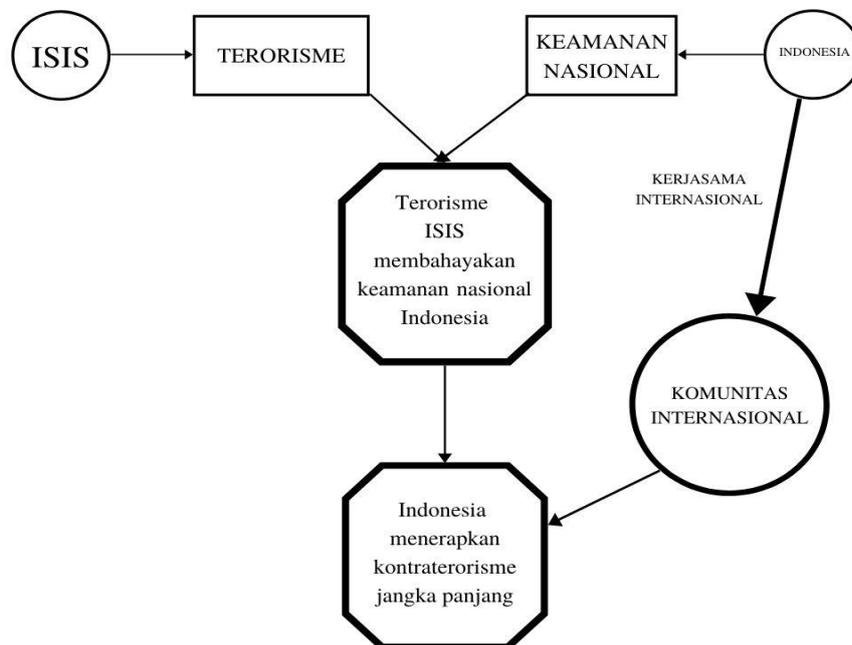
Jangka Panjang merupakan salah satu jenis Kontraterorisme. Jenis kontraterorisme ini mempresepsikan terorisme tidak sebagai sebuah gejala yang terisolir dan berdiri sendiri, melainkan sebagai salah satu konsekuensi dan hasil proses akumulasi dari serangkaian gejala yang telah terjadi. Dalam konteks ini, faktor-faktor struktural dalam masyarakat dan negara berperan paling signifikan dalam menciptakan terorisme. Menurut Ronald Crelinsten, kontraterorisme jangka panjang memiliki pandangan bahwa dalam rangka menghadapi terorisme secara efektif, maka aktor pemerintah negara harus melenyapkan faktor-faktor struktural yang dianggap sebagai akar-akar penyebab terorisme berupa deskriminasi, kemiskinan, kesejahteraan rendah, kesenjangan ekonomi, ketidaksetaraan hak, pengasingan politik, dan ideologi²⁶. Oleh sebab itu, berdasarkan kontraterorisme jangka panjang, aktor pemerintah negara seharusnya melakukan perubahan dan perbaikan struktural dalam rangka menghadapi terorisme. Perbaikan dan perubahan struktural yang dimaksud berupa memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, menurunkan tingkat kesenjangan, menciptakan transparansi, menghapus deskriminasi, memberikan kesetaraan hak dan akses politik yang sama bagi semua golongan. Tanpa adanya faktor-faktor struktural yang akar penyebab, terorisme tidak lagi relevan dan akan memudar. Namun, perubahan dan perbaikan struktural semacam ini membutuhkan waktu dan proses yang panjang dan hasilnya tidak dapat diperoleh secara langsung. Meskipun terkesan lambat dan tidak mampu menjanjikan hasil yang cepat, kontraterorisme

26 Ronald Crelinsten, *Op.cit.*, hlm. 9.

jangka panjang mampu menawarkan hasil dan keuntungan dalam jangka panjang dan cenderung bertahan lama.

1.5 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.1 Sintesa Pemikiran



(Sumber: Elaborasi Peneliti)

Berdasarkan kerangka pemikiran hasil elaborasi pihak peneliti

sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ini dan telah disampaikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa terorisme ISIS sebagai ancaman asing, membahayakan keamanan nasional Indonesia. Mengingat kondisi Indonesia sebagai negara berkembang yang masih memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan yang rentan dieksploitasi ISIS, Indonesia mengambil kebijakan kontraterorisme jangka panjang untuk melenyapkan masalah-masalah struktural yang berpotensi menjadi akar terorisme ISIS. Pada saat yang bersamaan, Indonesia juga saling menjalin kerjasama dengan komunitas internasional yang terdiri dari negara dan organisasi internasional dalam pelaksanaan upaya kontraterorisme jangka panjang dan melenyapkan ancaman terorisme ISIS di Indonesia.

1.6. Argumen Utama

Kebijakan keamanan nasional Indonesia terhadap terorisme kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) pada periode tahun 2014-2017 adalah kontraterorisme, lebih spesifiknya kontraterorisme jangka panjang. Dalam konteks ini, Indonesia mengambil pendekatan kontraterorisme yang bersifat non-koersif. Segala penggunaan unsur-unsur kekuatan keras akan sangat dibatasi dan hanya akan dikerahkan dalam keadaan paling darurat. Indonesia menempatkan prioritas pada perbaikan dan perubahan struktural untuk melenyapkan akar-akar terorisme ISIS, seperti memberantas kemiskinan, mengurangi kesenjangan, meningkatkan kesejahteraan, menyelenggarakan pembangunan, dan mewujudkan

kesetaraan hak melalui kampanye promosi penghapusan deskriminasi. Mengingat keterbatasan kapasitas Indonesia sebagai negara berkembang dan karakteristik ISIS sebagai organisasi teroris dan sekaligus ancaman asing yang beroperasi melampaui batas-batas kedaulatan negara, Indonesia juga akan saling menjalin kerjasama dengan anggota-anggota komunitas internasional, termasuk negara dan organisasi internasional, untuk memperoleh dukungan dalam melaksanakan kontraterorisme jangka panjang melawan ISIS.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian atas kebijakan keamanan nasional Indonesia terhadap terorisme kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) pada periode tahun 2014-2017 merupakan tipe Penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini digunakan dalam rangka mengkaji dan menjelaskan suatu gejala atau isu masalah melalui deskripsi atau pemaparan gambaran mengenai gejala tersebut secara spesifik dan sistematis. Melainkan menekankan pada penjelasan atas hubungan kausalitas atau sebab-akibat antar variabel-variabel dalam penelitian, penelitian deskriptif justru memprioritaskan pada pemaparan penjelasan mengenai variabel-variabel isu masalah tersebut. Menurut penjelasan yang dikemukakan oleh Lawrence Newman, pertanyaan bagaimana adalah merupakan pokok permasalahan dan fokus dari penelitian jenis ini²⁷. Tujuan penelitian

²⁷ Lawrence Newman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*,

deskriptif adalah memperoleh pemahaman dan gambaran secara menyeluruh dan sedetail mungkin atas isu masalah yang dikaji. Dalam rangka mencapai ini, pihak peneliti menggali dan mengakumulasikan data sebanyak mungkin mengenai gejala yang bersangkutan dari beragam sumber untuk kemudian dilengkapi dengan teori sebelum disajikan dalam bentuk pemaparan.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Dalam kajian atas kebijakan keamanan nasional Indonesia terhadap kebangkitan pengaruh kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) pada periode tahun 2014-2017, jangkauan penelitian mencakup peristiwa-peristiwa signifikan yang bersangkutan dengan ISIS dan kebijakan-kebijakan keamanan nasional tertentu yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme ISIS selama rentang kurun waktu yang sedemikian rupa. Dalam rangka memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan komprehensif, pihak peneliti turut mempertimbangkan dinamika keadaan yang berlaku pada masa itu yang kemungkinan turut mempengaruhi gejala ini. Terlebih lagi, pihak peneliti tidak hanya mendasari penelitian dari sudut pandang dan pernyataan resmi pihak pemerintah Indonesia yang mengambil kebijakan keamanan nasional dalam menghadapi terorisme ISIS, melainkan turut mencakup pihak-pihak lain yang memiliki relevansi dengan isu masalah yang dikaji atau aktor-aktor yang terlibat. Pihak peneliti sengaja membatasi jangkauan waktu penelitian pada periode 2014-2017 sebab pada periode ini ISIS mengalami perkembangan yang

(Boston: Allin and Bacon, 1997), hlm 19.

dinamis berupa kebangkitan dan pada akhirnya kejatuhan.

Dalam melaksanakan penelitian ini, pihak peneliti membutuhkan waktu penelitian selama kurang lebih satu semester dengan ruang lingkup penelitian yang mencakup daerah Kota Surabaya, Jakarta, dan Jombang. Hal ini dikarenakan kebutuhan pihak peneliti untuk menggali data-data yang lebih banyak, detail, dan sulit didapatkan hingga dapat dikatakan tidak dapat diperoleh dengan mudah dari ranah umum, sehingga penelitian ini memiliki bobot substansi yang kuat dan unik. Terlebih lagi, rentang waktu penelitian yang cukup panjang dibutuhkan oleh pihak peneliti untuk menyesuaikan ketersediaan narasumber yang tidak dapat ditemui setiap saat dan tergolong sulit ditemui tanpa izin khusus yang dimiliki oleh pihak peneliti. Kota Surabaya, Jakarta, dan Kabupaten Jombang dipilih sebagai ruang lingkup penelitian sebab dua dari tiga daerah tersebut yaitu Kota Surabaya dan Jakarta merupakan dua kota terbesar dan pusat aktivitas di Indonesia yang berperan signifikan dalam pertahanan dan keamanan negara, mudah diakses menggunakan berbagai metode transportasi, serta ditempati oleh sebagian besar narasumber. Sedangkan Kabupaten Jombang turut dipilih sebab daerah tersebut memiliki banyak pesantren dan merupakan salah satu basis gerakan umat Islam yang terbesar di Indonesia, sehingga sangat rentan menjadi sasaran pengaruh ISIS untuk tujuan organisasi tersebut dan diawasi secara ketat oleh pemerintah negara Indonesia.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka melakukan kajian atas kebijakan keamanan nasional

Indonesia terhadap terorisme kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) pada periode tahun 2014-2017, digunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, wawancara, observasi, dan studi pustaka.

1.7.3.1 Studi Pustaka

Menurut pengertian yang dikemukakan oleh Nazir, metode penelitian studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan studi penelaahan buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki relevansi hubungan dengan isu masalah yang hendak dipecahkan²⁸. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan ini, maka secara dapat diinterpretasikan bahwa metode penelitian studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang fokus dalam pencarian data dan informasi melalui beragam media yang memiliki relevansi dan dapat digunakan untuk mendukung penelitian. Metode penelitian studi pustaka pada umumnya digunakan pada tahap awal penelitian sebagai landasan dasar penelitian. Namun, metode penelitian ini turut dapat digunakan untuk memperoleh data sekunder atau tidak langsung yang kemudian diperbandingkan antara teori dengan praktik di lapangan. Dalam penelitian ini, pihak peneliti melakukan studi pustaka atas buku dan literatur ilmiah mengenai terorisme, kontraterorisme, dan ISIS.

1.7.3.2 Wawancara

Metode penelitian wawancara merupakan teknik pengumpulan data berupa interaksi dialog percakapan tanya jawab yang dapat dilakukan, baik secara

28 Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2013), hlm.79.

langsung maupun tidak langsung, antara pihak peneliti sebagai pihak penanya dengan pihak yang hendak diteliti sebagai pihak penjawab atau narasumber dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud dalam konteks ini berupa data atau informasi pengetahuan yang bersifat subjektif dan dipahami oleh narasumber. Pelaksanaan wawancara dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur. Apabila wawancara bersifat terstruktur, maka pihak peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang akan ditanyakan ke pihak narasumber. Sedangkan wawancara tidak terstruktur berarti pihak peneliti tidak mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, sehingga proses wawancara berjalan secara impromptu dan kondisional. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai sejumlah tokoh yang merupakan pakar dan mengamati perkembangan terorisme ISIS di Indonesia, dan pihak-pihak tertentu yang mewakili organisasi masyarakat Islam yang dan terlibat langsung dalam kerjasama dengan pemerintah Indonesia dan menghadapi terorisme ISIS. Pihak-pihak yang diwawancarai oleh pihak peneliti terdiri dari Uztadz Harits Abu Ulya yang merupakan tokoh pakar dan pengamat terorisme, serta pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Al-Bayan di Bojonegoro, Jawa Timur, Dicky Martiaz, Kepala Koresponden Australia Broadcasting Company untuk Kawasan Asia, dan seorang tokoh dan pengurus salah satu pondok pesantren NU yang identitas aslinya disembunyikan untuk kepentingan penelitian dan hanya dirujuk sebagai Ali.

1.7.3.3 Observasi

Metode penelitian observasi dapat diinterpretasikan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan sekaligus pencatatan laporan secara sistematis dan seakurat mungkin terhadap objek isu masalah yang diteliti. Dalam proses observasi pihak peneliti turut menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengamatan yang diperoleh sebelum dimasukkan kedalam catatan. Tujuan dari observasi adalah memperoleh data atau informasi berupa gambaran secara menyeluruh atas keadaan, latar, dan aktivitas pihak yang terlibat dalam kegiatan. Metode penelitian observasi dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan tingkat keterlibatan pihak peneliti. Di satu sisi, terdapat observasi partisipan yang menempatkan pihak peneliti sebagai pengamat yang secara aktif dan langsung terlibat dalam aktivitas atau lingkungan yang diamati. Sedangkan observasi non-partisipan hanya menempatkan pihak peneliti sebagai pengamat pasif dari luar objek yang diamati. Dalam penelitian ini, pihak peneliti menempatkan fokus observasi pada penyebaran pengaruh ISIS di Indonesia beserta dampaknya dan upaya-upaya kinerja pemerintah negara Indonesia dalam menghadapi gejala ini.

1.7.3.4 Dokumentasi

Menurut Sugiyono, metode penelitian dokumentasi didefinisikan sebagai catatan peristiwa yang telah berlalu dan dapat berupa tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang²⁹. Apabila bertolak dari penjelasan ini, maka secara garis besar metode penelitian dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data

29 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung, Alfabeta, 2011), hlm. 241.

penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji dokumen-dokumen mengenai catatan peristiwa yang telah berlalu dalam rangka memperoleh data atau informasi yang relevan dengan isu masalah yang dikaji. Metode penelitian dokumentasi turut memungkinkan bagi pihak peneliti untuk memperoleh perspektif atau sudut pandang dari pihak lain untuk meningkatkan pemahaman lebih lanjut. Dalam metode ini pihak peneliti mengakumulasi data dari dokumen-dokumen yang telah dibuat dan tersedia, serta bersangkutan dengan penelitian yang dilaksanakan. Pada umumnya dokumentasi digunakan untuk melengkapi data tidak dapat diperoleh secara langsung melalui metode-metode penelitian lain.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif ini, pihak peneliti menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data. Teknik analisis ini dilakukan dengan cara menggunakan data-data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan dari proses studi pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian mereduksi dan mengkorelasikan data-data tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian. Proses ini memungkinkan penelitian tetap fokus, relevan, dan tidak menyimpang. Pihak peneliti kemudian melakukan proses analisa lebih lanjut dengan menghubungkan data-data ini dengan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian hingga mampu menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan penelitian. Setelah diolah dengan terperinci dan matang, data-data ini kemudian disajikan dan dipresentasikan dalam penyusunan yang mampu

dipahami secara komprehensif.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Bab I: Terdiri atas sejumlah sub-bab, yaitu: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Sintesa Pemikiran, Argumen Utama, Metodologi Penelitian.

Bab II: Dalam bab II, pihak peneliti memaparkan kondisi Indonesia sebagai negara berkembang dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan hubungan internasional Indonesia dalam kontraterorisme.

Bab III: Bab ini memaparkan analisis kebijakan keamanan nasional Indonesia dan kerjasama internasional Indonesia dalam menghadapi terorisme ISIS pada periode tahun 2014-2017 dan menjawab rumusan masalah.

Bab IV: Bab ini adalah bab terakhir dan sekaligus penutup yang berisi kesimpulan dan saran.